



Perbaiki 1.627 RTLH, Pemkot Yogya Cari Pendanaan Pusat

YOGYA, TRIBUN - Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) ternyata masih bercokol di sudut-sudut permukiman penduduk di Kota Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pun telah mencanangkan perbaikan menyasar 150 RTLH pada tahun ini.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, berujar, sampai sejauh ini, RTLH yang masih jadi pekerjaan rumahnya berada di kisaran 1.627 unit. Adapun Kemantren Tegalrejo jadi wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi menyentuh 327 unit, sedangkan Kemantren Gondomanan terendah dengan tersisa 22 unit rumah saja.

Sigit tidak menampik, jumlah tersebut, masih sama dengan catatannya pada awal 2025 lalu, lantaran proses penanganan belum bergulir. "Sehingga, jumlah RTLH-nya masih belum berkurang, karena belum ada penanganan, khususnya yang dengan APBD."



Sehingga, jumlah RTLH-nya masih belum berkurang, karena belum ada penanganan, khususnya yang dengan APBD.

ungkapnya, Senin (2/6).

Dijelaskan, data RTLH yang dikantongi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta merupakan rumah yang secara syarat memenuhi aspek atas hak dan legalitasnya. Oleh sebab itu, sebelum masuk pada tahap perbaikan rumah, dalam proses administrasinya pun wajib melalui beberapa tahapan terlebih dahulu.

"Sekarang baru analisis tingkat kerusakan," sambil diusulkan pendanaan pusat. Kalau dari pusat, sudah ada kepastian mana yang akan

ditangani dari data itu. Setelahnya, kami baru *action*, biar *enggak* tumpang tindih," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan, jika hanya mengandalkan APBD, problem rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih ribuan jelas tidak akan tuntas. Ditambah lagi, skema pemanfaatan anggaran negara untuk memperbaiki rumah milik warga cenderung rumit dan tidak semudah membalik telapak tangan.

"Apalagi, rumahnya sering masih belum jelas, kan harus ada sertifikat ini itu ini itu. Padahal, rumahnya sudah hampir rubuh. Nah, makanya, strateginya adalah gotong royong," ucapnya.

Mantan Kepala BKKBN RI itu menyebut, semangat ini selaras dengan slogan Kota Yogyakarta 'Segoro Amarta' (Semangat Gotong Rotong Agawe Majune Ngayogyakarta). Harapannya, slogan pun tidak berhenti pada simbol-simbol semata, namun juga terimplementasikan untuk kesejahteraan warga masyarakat. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005